

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH
KEUANGAN (SIMDA Keuangan) DALAM PENGOLAHAN DATA
KEUANGAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang)**

A. Latar Belakang

Topik tentang penciptaan tata pemerintahan yang baik, bersih dan efisien sangat diharapkan saat ini. Terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan efisien sangat penting, artinya bukan hanya agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang prima melainkan juga untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan dunia usaha tumbuh lebih sehat dan efisien agar investor lebih terdorong untuk meningkatkan investasinya.

Guna mencapai tata pemerintahan yang baik, sumber daya manusia yang unggul saja tidak akan berhasil tanpa didukung oleh suatu sistem tata kerja yang handal dan relevan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat dewasa ini membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan demikian, kebutuhan akan data dan informasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tujuan organisasi dapat tercapai. Perkembangan teknologi saat ini mendorong organisasi untuk mengolah datanya dengan cepat, lengkap dan akurat.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu

sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001:21). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik seperti komputer, maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan disuatu daerah (Handyaningrat, 2010:143).

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan ataupun ditingkat akuntansi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu

pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi manajemen yang lebih luas dari berbagai subsistem yang ada dalam SIMDA tersebut. Salah satu paket aplikasi SIMDA yang diterapkan oleh Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan yaitu SIMDA Keuangan, yang membantu Kecamatan Bintan Pesisir mengolah data keuangan serta melaporkan data keuangan tersebut ke instansi di atasnya (Pemerintah Kabupaten Bintan). Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan telah menerapkan SIMDA sejak tahun 2014, diawal penerapannya sistem ini masih menemui beberapa kendala teknis terkait dengan proses pelaporan keuangan, akan tetapi *output* yang dihasilkan oleh sistem ini lebih terstruktur daripada penyusunan dengan sistem manual.

Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisa kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut pada sebuah usulan penelitian dengan judul : **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah**

Daerah (Studi kasus pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan).

B. Landasan Teoritis

Di dalam suatu penelitian, teori merupakan hal yang sangat penting sehingga masalah yang akan dibuktikan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum membahas lebih jauh tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang, *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) dan Sistem Informasi Manajemen.

1. *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik)

Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat. *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (*World Conference on Governance*, UNDP, 1999).

Hal ini diperkuat dengan adanya prinsip-prinsip *good governance* seperti yang dituliskan oleh Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul

“Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan”, yaitu:

1. Akuntabilitas , yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Transparansi, dapat dilihat dalam 3 aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuannya adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberi informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi tentang peraturan, hukum dan anggaran.
3. Prinsip efisiensi dan efektivitas, yakni terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
4. Supremasi hukum, yakni adanya kepastian dan penegakan hukum, adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum dan adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Dengan terpenuhinya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional diharapkan upaya penataan kehidupan sosial, ekonomi dan politik akan terwujud.

2. Sistem Informasi Manajemen

Menurut Parker, sebagaimana dikutip Kumorotomo dan Margono (2009:16) Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer adalah “suatu sistem informasi manajemen yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting, dan secara garis besar Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Manusia

Setiap Sistem Informasi Manajemen yang berbasis harus memperhatikan unsur manusia supaya sistem yang diciptakan bermanfaat. Hendaknya diingat bahwa manusia merupakan penentu keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dan manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen.

2. Perangkat Keras (*hardware*)

Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin, karena itu, perangkat keras terdiri dari komputer beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran, perkakas penyimpanan dan perkakas komunikasi.

3. Perangkat lunak (*software*)

Istilah perangkat lunak merujuk kepada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya. Yang disebut program

komputer adalah intruksi-intruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia. Program komputer biasanya disimpan di dalam medium *input/output*, misalnya disket, pita atau *compact disk*, untuk selanjutnya dipakai komputer dalam fungsi pengolahannya.

4. Data

Data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang bermanfaat. Data inilah yang akan dipilahkan, dimodifikasi atau diperbarui oleh program-program komputer supaya menjadi informasi tersebut.

5. Prosedur

Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya saja peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang disuatu instansi harus tercatat di dalam basis data komputer atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induknya harus dilaporkan waktu dan otoritasnya.

Dengan sedikit menyimpulkan pendapat Parker bahwa sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Di mana secara teknis pelaksanaan sistem informasi meliputi empat bagian, yakni *input*, pengolahan, penyimpanan dan *output*. Selain itu sistem informasi merupakan sekumpulan *hardware*, *software*, data dan prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi

informasi yang bermanfaat guna memecahkan suatu masalah dan pengambilan keputusan.

C. Hasil Penelitian

Sistem informasi manajemen berbasis komputer aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) adalah suatu sistem informasi manajemen yang menempatkan perangkat pengolahan data komputer dalam kedudukan penting. Penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) yang diterapkan di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan sebagaimana menurut Parker dalam Kumorotomo dan Margono (2009:16) dapat dilihat dari dimensi sebagai berikut :

1. Manusia

Berdasarkan informasi yang didapat dari *informan* dan *key informan*, dan mengacu teori Parker tentang manusia yang menyebutkan manusia merupakan penentu keberhasilan Sistem Informasi Manajemen dan manusia adalah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Manajemen, maka dapat disimpulkan bahwa manusia dalam hal ini adalah pengguna aplikasi SIMDA Keuangan yaitu pegawai pada Kecamatan Bintan Pesisir telah dapat mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan dengan baik dalam pengolahan data keuangan, baik dari segi *inputan* data, pemrosesan data serta *outputan* data. Sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

2. Perangkat Keras (*hardware*)

Berdasarkan informasi yang diberikan *informan* dan *key informan* tentang perangkat keras dalam pengolahan data keuangan pada aplikasi SIMDA Keuangan dan mengacu dari teori Parker tentang perangkat keras pada Sistem Informasi Manajemen yang menyebutkan, istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin beserta semua perangkat pendukungnya. Perangkat pendukung yang dimaksud adalah perkakas keluaran, perkakas penyimpanan dan perkakas komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat keras pada aplikasi SIMDA Keuangan adalah kesatuan unit alat yang dijadikan sebagai alat untuk memproses data mulai dari proses input, proses dan output.

Perangkat keras terdiri dari laptop, printer serta alat transfer data berupa *flashdisk*. Laptop yang didalamnya terdapat bagian-bagian seperti memori, *hardisk*, layar monitor, keyboard dan mouse dijadikan sebagai perkakas pengolah dan penyimpan data, sementara printer dijadikan perkakas pencetak data/hasil berupa laporan dan *flashdisk* sebagai alat transfer data, dapat juga menyimpan data yang hendak di ekspor-impor ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan. Keseluruhan unit tersebut akan dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal bila dioperasikan oleh pengguna yang terampil, sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai.

Gambar C.1
Perangkat Keras (hardware)



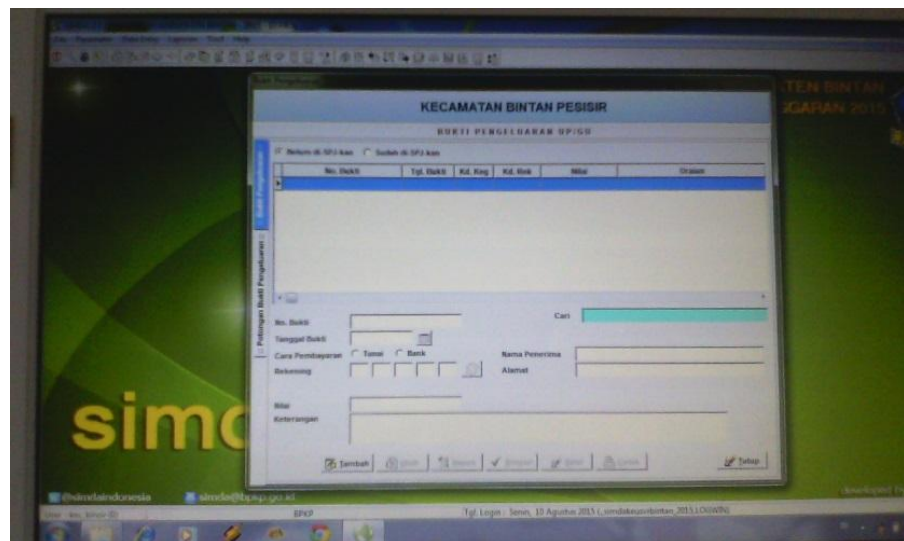
Sumber : *Tim SIMDA Keuangan Kecamatan Bintang Pesisir*

3. Perangkat Lunak (*software*)

Berdasarkan informasi yang didapat dari seluruh informan ditambah dengan tanggapan *key informan* dan merujuk dari teori Parker tentang perangkat lunak yaitu program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya. Yang disebut program komputer adalah intruksi-intruksi yang dapat dibaca oleh mesin yang memerintahkan bagian-bagian dari perangkat keras sistem informasi manajemen berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang

bermanfaat dari data yang tersedia. Maka dapat disimpulkan perangkat lunak yang dimaksud adalah *windows* dengan *database Microsoft SQL 2,7*. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh *windows* dengan *database microsoft SQL 2,7* cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kemampuannya menyimpan dan menjaga keakuratan data yang dapat dibuka sewaktu-waktu bila dibutuhkan, *microsoft SQL 2,7* dirancang sedemikian rupa untuk proses akuntansi dan pelaporan, dengan maksud memudahkan para pengguna SIMDA Keuangan dalam mengolah data keuangan. Dengan demikian data yang tersedia akan menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan organisasi.

Gambar C.2
Tampilan SIMDA Keuangan Pada Layar Monitor



Sumber : *Tim SIMDA Keuangan Kecamatan Bintang Pesisir*

4. Data

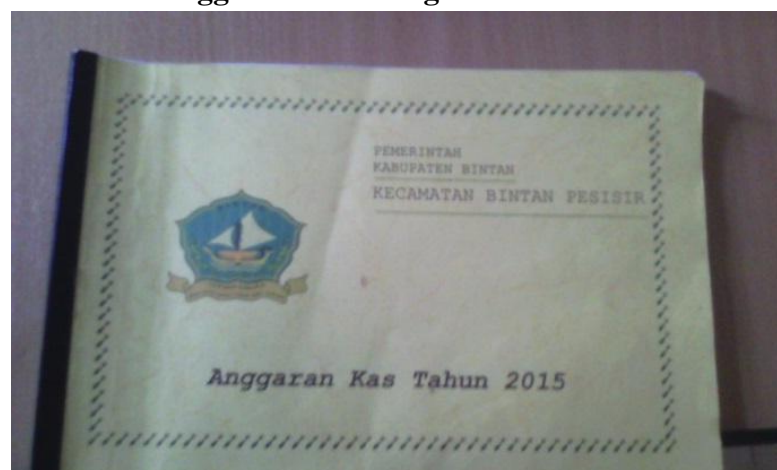
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seluruh *informan* dan *key informan* tentang dimensi data dapat dianalisa bahwa semua data yang tersaji pada aplikasi SIMDA Keuangan tersedia dengan lengkap sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dalam proses penginputan data, penerbitan

SPM (Surat Perintah Membayar), pelaporan, pengajuan dan pencairan dana serta membantu pengontrolan dalam penatausahaan keuangan.

5. Prosedur

Adalah peraturan yang digunakan untuk mengontrol permintaan kas yang sudah diinput sebelumnya atau yang telah tercatat sebelumnya di dalam database aplikasi SIMDA Keuangan yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *informan* dan *key informan* maka dapat dianalisa bahwa prosedur dalam penelitian ini adalah anggaran kas, yang digunakan untuk mengontrol pengajuan dana lebih terperinci tentang jumlah dana beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran kas di-input pada awal tahun anggaran berjalan dengan perincian belanja perbulan, namun selalunya anggaran kas hanya berisi rincian belanja langsung, karena belanja tidak langsung sistemnya dipegang langsung oleh DPPKD.

Gambar C.3
Anggaran Kas sebagai Prosedur



Sumber : Tim SIMDA Kecamatan Bintan Pesisir

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) dalam pengolahan data keuangan pada Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer pada penerapan aplikasi SIMDA Keuangan terdiri atas :

- 1) Sumber daya manusia sebagai pengguna atau pelaksana keuangan pada Kecamatan Bintan Pesisir adalah tim SIMDA Keuangan, tim SIMDA Keuangan sebagai unsur pengguna dan penerima manfaat penerapan sistem informasi berbasis komputer bertugas melakukan proses penatausahaan meliputi penginputan, pemrosesan dan mencetak keluaran. Dengan informasi yang lengkap seperti laporan yang maksimal, akan memudahkan pelaksana keuangan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perangkat keras, yaitu seluruh perangkat yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan data, berfungsi sebagai perkakas penyimpanan, perkakas keluaran dan perkakas komunikasi yang terdiri dari laptop, *mouse*, *flashdisk* dan printer.
- 3) Perangkat lunak, yaitu *microsoft SQL* versi 2,7 sebagai basis data. Sebagai basis data, tentunya *microsoft SQL* versi 2,7 dapat berfungsi

sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang tersedia.

- 4) Data, yaitu fakta berupa tulisan, angka, simbol, gambar, suara dan lainnya yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang dapat dijadikan informasi. Dalam hal ini adalah data master, data bendahara, data PPKeu, data register dan data laporan SPJ. Keseluruhan data dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat pula.
- 5) Prosedur, yaitu peraturan yang digunakan untuk mengontrol permintaan kas yang sudah diinput sebelumnya atau yang telah tercatat sebelumnya di dalam database aplikasi SIMDA Keuangan, dalam hal ini adalah anggaran kas. Dengan menggunakan anggaran kas, pengontrolan pengajuan lebih terarah.

b. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) dalam pengolahan data keuangan dikatakan efektif, efisien, transparan dan akuntabel terukur dari :

1) Segi usaha

Dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, waktu penginputan data, pemrosesan dan penerbitan hasil data menjadi lebih singkat, karena pengguna tinggal memilih data yang telah tersaji dan memasukkan ke dalam sistem.

2) Segi hasil

Dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, laporan yang dihasilkan lebih lengkap, terperinci dan akurat. Dengan demikian semua laporan tentang keuangan dapat dilihat secara jelas baik yang

sudah diajukan maupun sisa pada kas SKPD. Selain itu datanya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.

c. Dari hasil penelitian lapangan dan informasi dari para informan, ternyata terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) dalam pengolahan data keuangan di Kecamatan Bintan Pesisir adalah :

1) Faktor Pendukung :

(a) Dengan versi terbaru dari aplikasi SIMDA Keuangan, tampilannya pada layar monitor semakin jelas sehingga memudahkan pelaksana keuangan dalam memilih program.

(b) Meskipun berada di wilayah pesisir, namun seluruh perangkat keras pada Kecamatan Bintan Pesisir tersedia dengan lengkap, sehingga memudahkan pelaksana keuangan mengolah data keuangan.

(c) Tersedianya jaringan komunikasi seluler dengan baik, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data bisa menggunakan *handphone* tanpa harus datang langsung ke DPPKD yang berada di Kijang.

2) Faktor Penghambat :

(a) Kesalahan pengguna (*human error*) dalam menginput data dapat memperlambat suatu pekerjaan dikarenakan pembatalan datanya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan harus meminta kode perubahan.

(b)Adanya masa *expired* pada aplikasi SIMDA Keuangan yang pelaksana keuangan sendiri tidak mengetahui kapan itu waktunya, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengaktifkannya kembali.

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh di lapangan melalui teknik observasi dan wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) dalam pengolahan data keuangan di Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan sudah baik.

2. Saran

Menanggapi hasil penelitian di atas, maka peneliti berupaya memberikan saran yang membangun guna lebih meningkatkan pengolahan data keuangan khususnya dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan (SIMDA Keuangan) sebagai berikut :

- a. Agar lebih maksimal dalam mengolah data keuangan, hendaknya para pelaksana keuangan lebih diperhatikan dalam hal penambahan pengetahuan seperti mengikut sertakan pada bimbingan-bimbingan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data keuangan.
- b. Bapak Camat selaku pengguna anggaran dan penanggung jawab tim SIMDA Keuangan hendaknya dapat melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait, bilamana ada keluhan dan masukan dari anggota tim SIMDA Keuangan Kecamatan Bintan Pesisir terkait pengolahan data keuangan.

- c. Kepada ketua tim SIMDA Keuangan, hendaknya lebih sering berkoordinasi dengan tim SIMDA Kabupaten terkait masa expired SIMDA Keuangan yang tidak diketahui kapan waktunya tersebut, sehingga dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki.
- d. Kepada anggota Tim SIMDA Keuangan Kecamatan Bintang Pesisir khususnya operator SIMDA Keuangan, hendaknya dapat bekerja dengan lebih hati-hati, karena apabila terjadi kesalahan tidak dapat diperbaiki/dibatalkan sendiri melainkan harus mengkonfirmasi pihak DPPKD untuk meminta kode perubahan dan itu membutuhkan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.*

Jakarta : Gunung Agung, 1981

Kumorotomo, Wahyudi dan Subando Agus Margono. *Sistem Informasi*

Manajemen. Cetakan Keenam. Yogyakarta : Gadjah Mada University

Press, 2009

McLeod, Raymond, Jr. *Sistem Informasi Manajemen.* Edisi Ketujuh. Jakarta :

Prenhallindo, 2001

Moleong, J.Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Rajawali Pers, 1991

Moekijat, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen.* Cetakan Kesembilan.

Bandung : Mandar Maju, 2005

Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan*

Kepemimpinan Masa Depan. Bandung : Refika Aditama, 2009

Siagian, Sondang P. *Manajemen Abad 21.* Jakarta : Bumi Aksara, 2004

Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi,* Jakarta : Alfabeta, 2005

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kecamatan Bintan Pesisir

LAKIP Kecamatan Bintan Pesisir Tahun 2014

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian
dan Skripsi serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Univeristas Maritim Raja Ali Haji, 2011, Tanjungpinang.

Website :

<http://www.bpkp.go.id/index.php?idunit=19&idpage=516>